

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan pembangunan ekonomi kerap menjadi permasalahan mendasar yang dijumpai setiap negara. Rangkaian proses multidimensional dalam pembangunan ekonomi memiliki tujuan guna melaksanakan perubahan-perubahan mendasar dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta meminimalisasi masalah ketidakmerataan pembangunan ekonomi (Kurniawan et al., 2023). Salah satu pemicu munculnya permasalahan kemiskinan yakni adanya masalah ketenagakerjaan pada masyarakat di suatu wilayah. Terjadinya permasalahan ketenagakerjaan diindikasikan karena ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah penduduk usia kerja yang tersedia. Ledakan jumlah penduduk akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan jumlah tenaga kerja meningkat diiringi keterbatasan penciptaan lapangan kerja sehingga berdampak pada naiknya angka pengangguran yang berkorelasi dengan permasalahan pembangunan ekonomi lainnya. Permasalahan pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk mencapai kesejahteraan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat harus selaras dengan penyelesaian masalah penyerapan tenaga kerja.

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila pembangunan ekonomi berhasil dilakukan dengan menetapkan target krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permasalahan ketenagakerjaan. Kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat saja

namun seluruh lapisan masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan yang merata. Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menjadi tujuan utama bagi setiap negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi taraf hidup masyarakat merepresentasikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya dengan mudah. Peningkatan taraf hidup salah satunya dapat dinilai dari banyaknya penciptaan lapangan kerja baru sehingga penduduk angkatan kerja dapat terserap di lapangan pekerjaan, selain itu kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi juga dilakukan melalui mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga produktivitas masyarakat semakin tinggi (Pranata & Idris, 2021).

Peningkatan produktivitas dapat dilihat dari semakin banyak faktor produksi yang dimanfaatkan dalam sebuah proses produksi sehingga dapat meningkatkan peningkatan nilai output masyarakat dan menggambarkan majunya pertumbuhan ekonomi. Dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari output yang dihasilkan melainkan juga memperhatikan proses kegiatan ekonomi dalam memmanifestasikan pendapatan bagi masyarakat dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang baik membawa peluang kesejahteraan bagi masyarakat (Pratiwi & Indrajaya, 2019).

Kesempatan bagi suatu negara lebih banyak dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tetap bergantung pada kecakapan pemerintah dalam mengolah dan mengalokasikan sumber daya ekonomi dan memperhatikan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan pada setiap golongan masyarakat, karena pemerataan pendapatan juga penting dalam mendukung keberhasilan

pembangunan ekonomi agar tidak adanya timpang tindih pada setiap wilayah (Pratama, 2021)

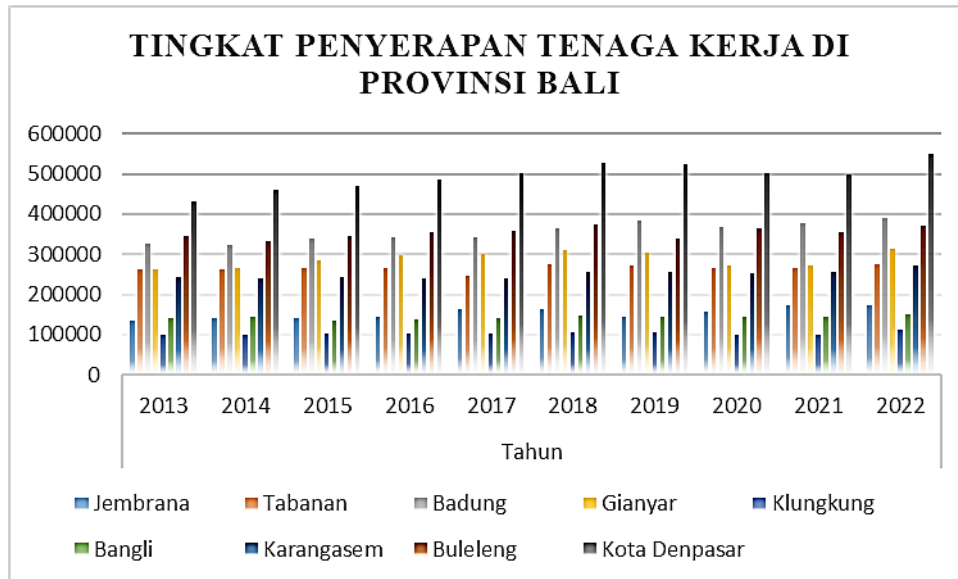
Keberhasilan pembangunan ekonomi tentunya diintervensi berbagai faktor, salah satu faktor adalah sumber daya manusia (SDM) dengan perannya sebagai tenaga kerja. Melalui pendayagunaan jumlah tenaga kerja untuk terserap di lapangan pekerjaan yang tersedia dapat memacu pertumbuhan ekonomi guna tercapainya pembangunan ekonomi yang merata (Agustin, 2022). Masalah ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan dapat memunculkan permasalahan pengangguran yang mana menginterpretasikan keterbatasan penyerapan tenaga kerja sehingga masih menjadi pengawasan pemerintah dalam sektor perekonomian (Wijayanto & Ode, 2019).

Pengangguran dapat meningkat seiring dengan tidak seimbangnya ketersediaan lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang terus bertambah. Permasalahan tersebut disebabkan tingkat persebaran penduduk yang tidak merata dan jumlahnya yang terus bertambah dengan tidak diimbangi kualitas kredibel sehingga menghambat keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional. Jumlah penduduk yang banyak dapat menjadi beban apabila kualitas sumberdaya manusia tidak potensial dan kurang produktif dalam mengolah keanekaragaman kekayaan alam yang tersedia. Hal tersebut dapat ditanggulangi apabila memaksimalkan potensial kualitas penduduk dengan menyeimbangkan peningkatan ketersediaan lapangan kerja guna meningkatkan pembangunan daerah karena penduduk merupakan salah satu roda penggerak pembangunan (Wiasih & Karmini, 2021).

Kegagalan penyerapan tenaga kerja tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, namun terdapat faktor-faktor lain yang mengintervensi seperti tingginya pertumbuhan penduduk khususnya terjadi di negara berkembang sehingga permasalahan tersebut harus cepat dituntaskan. Tingginya angka pertumbuhan penduduk akan disusul dengan naiknya angkatan kerja yang dimana juga membutuhkan solusi berupa perluasan dan penciptaan lapangan kerja agar penyerapan tenaga kerja selaras dengan angkatan kerja yang tersedia. Andaikata penyelesaian masalah tersebut tidak ditanggulangi dengan baik maka akan menyebabkan munculnya masalah naiknya tingkat pengangguran yang akhirnya akan berimpak pada naiknya tingkat kemiskinan.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kabupaten/kota sebanyak sembilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan pembangunan ekonomi dan tidak terserapnya angkatan kerja juga terjadi di provinsi Bali sehingga membutuhkan perencanaan dan solusi yang akurat untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satu arah pembangunan di Indonesia yaitu mengentas masalah pengangguran melalui pemaksimalan penyerapan tenaga kerja yang masih menjadi faktor primer sehingga perlu pengoptimalan dalam pengawasan. Bali memiliki letak strategis dan fungsional. Apabila dilihat sumbangsuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tentu memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai bidang perekonomian salah satunya sektor pariwisata. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ketidakmeratanya lapangan pekerjaan justru menjadi pemicu adanya permasalahan lain seperti kemiskinan dan pengangguran.

**Grafik 1. 1 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali**



Sumber : BPS Provinsi Bali (diolah)

Pada grafik tersebut penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013-2022 dari ke sembilan kabupaten/kota di Provisni Bali berfluktuatif dengan besaran angkanya tergolong stabil atau perubahannya sangat sedikit. Terhitung sepuluh tahun, perolehan rata-rata dari angka penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah Kota Denpasar sebanyak 494.917 orang. Angka penyerapan tenaga kerja tertinggi di Kota Denpasar selama 2013-2022 terjadi pada tahun 2022 menyentuh di angka 550.214 orang besaran angka tersebut naik dari tahun sebelumnya diindikasi karena mulai banyaknya lapangan pekerjaan baru, lalu untuk angka penyerapan tenaga kerja terendah di Kota Denpasar berada di angka 429.844 orang yaitu pada tahun 2013. Sebaliknya, perolehan rata-rata dari angka penyerapan tenaga kerja terendah diduduki oleh Kabupaten Klungkung dengan angka 103.716 orang. Kabupaten Klungkung memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja terendah berturut-turut setiap tahunnya, dengan perolehan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah yaitu pada

tahun 2021 sebanyak 98.691 orang. Selain itu, untuk kabupaten/kota lainnya selain Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung angka penyerapan tenaga kerjanya cenderung stabil dan fluktuatifnya memiliki selisih yang tidak jauh.

Besaran ke sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali tingkat penyerapan tenaga kerja selama sepuluh tahun terlihat menunjukkan kenaikan di setiap tahunnya meskipun terdapat beberapa Kabupaten/Kota di tahun tertentu menunjukkan penurunan angka penyerapan tenaga kerja. Dari angka penyerapan tenaga kerja yang fluktuatif diindikasikan oleh aktivitas perekonomian apabila meningkat maka akan diikuti naiknya penghasilan dan berkorelasi pada meningkatnya pola konsumsi yang pada akhirnya dapat memunculkan lapangan kerja baru sehingga penyerapan tenaga kerja ikut meningkat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir ketidakmerataan tingkat penyerapan tenaga kerja diperlukannya rekonstruksi kebijakan sehingga dapat menangani permasalahan khususnya ketenagakerjaan selain itu sumbangsih dari masyarakat juga penting bagi keberlangsungan tercapainya pemerataan penyerapan tenaga kerja guna meminimalisasi naiknya angka pengangguran.

Selanjutnya, produk domestik regional bruto yang memiliki peranan penting dalam masalah ketenagakerjaan. Besaran PDRB akan berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut ditunjukkan teori Keynes dalam (Hartono et al., 2018) bahwasannya pasar barang menjadi cermin dalam keadaan di pasar tenaga kerja, output produksi yang meningkat akan diikuti dengan naiknya jumlah pekerja. Apabila dikaitkan dengan konsep produksi yang menyatakan peningkatan penggunaan input berupa tenaga kerja akan meningkatkan output yang

dihasilkan. Dalam aktivitas perekonomian dari sisi permintaan pada tingkat output yang diproduksi tentu berimpak pada pendayagunaan inputnya yakni tenaga kerja.

Berdasarkan data yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali terkait data PDRB selama 10 tahun mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013-2022 PDRB Kabupaten Denpasar memiliki angka yang paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali. Rata-rata PDRB Kabupaten Denpasar selama 10 tahun terakhir yaitu senilai 31.189,38 milyar rupiah dan tidak jauh beda dengan Kota Badung yaitu senilai 31.125,00 milyar rupiah lalu disusul Kabupaten Buleleng senilai 20.633,39 milyar rupiah dan Kabupaten Gianyar senilai 16.565,57 milyar rupiah. PDRB tertinggi di Provinsi Bali diduduki oleh Kabupaten Badung pada tahun 2019 sebesar 37.326,47 milyar rupiah. Tingginya perolehan PDRB di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Gianyar disebabkan aktivitas ekonomi dalam menciptakan barang dan jasa demi meningkatkan pendapatan juga tinggi didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mumpuni. Sebaliknya, rata-rata PDRB terendah yaitu pada Kabupaten Bangli yang hanya senilai 4.066,32 milyar rupiah. PDRB di Kabupaten Bangli setiap tahunnya menduduki nilai terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Perbedaan nilai PDRB di setiap kabupaten/kota salah satunya disebabkan perbedaan sumber daya alam dan jenis pekerjaan yang berbeda. Semakin kecilnya nilai output pada PDRB berkorelasi dengan input berupa tenaga kerja yang terserap di lapangan pekerjaan.

Berikutnya, upah minimum ikut berkontribusi pada masalah ketenagakerjaan dicerminkan dari sisi permintaan tenaga kerja yang mana dapat mengakibatkan depresiasi penyerapan tenaga kerja apabila upah yang diberikan meningkat. Hal

tersebut dapat terjadi karena perusahaan akan mengurangi tenaga kerja guna mengurangi beban perusahaan tercermin lewat penghematan biaya produksi seiring meningkatnya upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Menurut Todaro dalam (Ardiansyah, 2022) bahwa penyerapan tenaga kerja dapat menurun seiring dengan kenaikan upah dan berdampak pada pengurangan permintaan tenaga kerja yang berakhir timbulnya masalah baru yaitu pengangguran.

Berdasarkan data yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali khususnya data upah minimum selama 10 tahun terakhir mendapati kenaikan. Dari sembilan kabupaten/kota mengalami perolehan fluktuasi kenaikan, namun perolehan upah minimum tertinggi setiap tahunnya yaitu Kabupaten Badung dengan rata rata upah minimum selama 2013-2022 sebesar Rp2.347.874,00. Kenaikan upah minimum pada Kabupaten Badung terbilang konsisten bahkan sekalipun terjadinya Covid-19 pada tahun 2020 upah minimumnya tetap naik dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan kualitas sumber daya manusianya yang kredibel dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan profesional. Disusul dengan Kota Denpasar yang memiliki upah minimum tertinggi kedua setelah Kabupaten Badung dengan kisaran angka rata ratanya selama 2013-2022 sebesar Rp2.225.443,00 besaran angka tersebut diakibatkan kegiatan perekonomian sebagian besar terpusat di Kota Denpasar.

Kabupaten Tabanan juga menyusul dengan selisih angka yang tidak jauh juga dengan Kota Denpasar di kisaran angka rata ratanya selama 2013-2022 sebesar Rp2.101.528,00 sama halnya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan juga memiliki andil dalam perekonomian yang cukup banyak sehingga dapat menaikkan upah minimumnya. Sebaliknya, perolehan rata-rata upah



minimum terendah yaitu pada 2013-2022 Kabupaten Bangli hanya di angka Rp2.004.609,00. Angka tersebut memiliki *gap* yang cukup jauh dengan perolehan rata-rata upah minimum milik Kabupaten Badung. Rendahnya upah minimum di Kabupaten Bangli karena menyesuaikan dengan ragam kualitas kehidupan dan biaya hidup dengan mengorelasikan pada keadaan di Kabupaten Bangli, selain itu penetapan besaran upah minimum tentu diterapkan oleh pemerintah setempat agar meminimalisir adanya permasalahan terserapnya tenaga kerja.

Kemudian, angkatan kerja memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut Todaro 2000 dalam (Rachman Yuditya, 2015) menjelaskan bahwa masalah ketenagakerjaan yang tidak terserap penuh dalam lapangan pekerjaan akan menyebabkan pengangguran karena peluang kerja dan produktivitasnya rendah seiring dengan keterbatasan permintaan. Apabila pengangguran pada suatu wilayah tergolong tinggi maka mencerminkan sumberdaya tenaga kerja yang tersedia tidak direkrut secara penuh demi mengembangkan perekonomian. Sehingga dapat dikorelasikan dengan berkurangnya jumlah angkatan kerja tentunya akan menurunkan kesejahteraan yang dimana dapat berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali terkait dengan angkatan kerja selama 10 tahun cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013-2022 Kota Denpasar mengungguli di angka rata-ratanya yaitu sebesar 513.838 jiwa dan angka tertinggi selama 10 tahun berada di tahun 2022 sebesar 579.643 jiwa. Selain itu, Kabupaten Buleleng juga memiliki rata-rata yang cukup besar setelah Kota Denpasar yaitu sebesar 365.709 jiwa. Sebaliknya, Kabupaten Klungkung memiliki rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja

terendah di Provinsi Bali yaitu sebesar 106.287 jiwa dan angka terendah selama 10 tahun terakhir berada di tahun 2013 sebesar 101.530 jiwa hal tersebut terjadi karena Kabupaten Klungkung penduduk usia kerja banyak yang bertransmigrasi. Namun, tingginya angkatan kerja wajib dibarengi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga tidak memunculkan permasalahan penurunan penyerapan tenaga kerja yang berujung menimbulkan pengangguran.

Berdasarkan permasalahan di atas, menjadikan peneliti terdorong untuk menelaah terkait Penyerapan Tenaga Kerja yang dikorelasikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Angkatan Kerja di Provinsi Bali. Maka dari itu, peneliti bertujuan untuk mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul : **“Analisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, dan Angkatan Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diinterpretasikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali?
3. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian dimaksudkan sebagai batasan permasalahan yang diteliti. Batasan masalah yang diangkat sebagai fokus utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini meliputi gabungan data time series dan cross section atau disebut data panel dalam rentang tahun 2013-2022 di Provinsi Bali.
2. Penelitian ini menetapkan Penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, dan Angkatan Kerja sebagai variabel bebas.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai penambah wawasan dan pengetahuan serta implementasi pembelajaran dalam rangka penulisan karya ilmiah. Selain itu dapat dijadikan pengalaman guna menyelesaikan permasalahan serta penemuan solusi khususnya pada permasalahan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan referensi dalam menyusun kebijakan yang cermat terkhusus pada permasalahan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali.

3. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dan rujukan terkait permasalahan Penyerapan Tenaga Kerja.